

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib, 2018, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Arba dan Diman Ade Mulada, 2020. *Hukum Hak Tanggungan (Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, 1997, Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta.
- Hasan, Djuahenda, 2011, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Cetakan Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)*, Ind-Hil-Co, Jakarta.
- H.S, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Khairandy, Ridwan, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kolopaking, Anita D.A., 2013, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, PT ALUMNI, Bandung.

- Kusumatuti, Dora, 2019, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish, Yogyakarta.
- Laila M.Rasyid dan Herinawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press Sulawesi.
- M. Hadjon, Philipus, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Meuwisseb, 2008, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori hukum dan Filsafat Hukum* terjemahan Arief Sidharta, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Naja, H.R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers HandBook*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panggabean, Henry Pandapotan, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi, Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, 2012, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, CV. Malibu, Jakarta.
- Rompegading, Andi Melantik, 2020, *Hak Tanggungan dalam Kepailitan Debitor*, Alqaprint Jatinangor, Bandung.
- Soesilo, R. 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2020, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta.

- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa Jakarta. Dalam Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Supramono, Gatot, 2013. *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suyatno, Anton, 2018, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widodo Dwi Putro, et.al, 2016, *Penjelasan Hukum: Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobjek Tanah*, LeIP, Jakarta.
- Wira Franciska, 2007, *Pembebanan Tanah Dalam Perjanjian Pinjaman Dana Dengan Jaminan Tanah Belum Bersertifikat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Tesis Universitas Padjajaran, Bandung.
- Yanuar, Purwaning M., 2017, *Pengembalian Aset Hasil Koruspi*, Alumni, Jakarta.
- Zulkarnaen, 2017, *Penyitaan dan Eksekusi*, CV Pustaka Setia, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara nomor 3632.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksaa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukti Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1731 K/PDT/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KARYA ILMIAH

Anwar, Mohammad, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1996*, Jurnal Jendela Hukum, Vol. 1 No. 1, <http://ejournal.wiraraja.ac.id/index.php/FH/article/view/28>.

Christy, Maria Acynta, 2022, *Penyimpangan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol 7 No. 1, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/3011/1897>

Deypend Tommy Sibuea, R.B. Sularto, dan Budhi Wisaksono, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Diponegoro Law Review, Vol. 5 No. 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11101/10770>.

Doly, Denico, *Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya*, Jurnal Negara Hukum Vol. 2 No. 1, <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.185>.

Fathin Abdullah, Triono Eddy, dan Marlina, 2021, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 09 No. 01, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/2011/1842>.

Juangga dan Saputra Dalimunthe, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol 1 No. 2, <https://doi.org/10.59141/jiss.v1i02.15>.

- Manery, Barnabas Dumas, 2017, *Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Kontruksi*, Jurnal SASI, Vol. 23 No. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/316074-makna-dan-fungsi-itikad-baik-dalam-kontr-cb663b61.pdf>
- Nugraha, Sigit Prabawa, 2020. *Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Proceeding National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, Vol. 1 No. 1, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1532>.
- Pandean, Sri Rahayu, 2016, *Jaminan Perjanjian Kredit Bank Dalam Penyaluran Dana Bagi Masyarakat*, Lex et societis, Vol IV No. 2, <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.1.11433>.
- Pratama, Wahyu, 2015, *Tinjauan Hukum tentang Sertifikat Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*. Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 6 Vol 3, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5943>.
- Saputra, Reki, 2017, *Tantangan penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Jurnal integritas, Vol. 3, No. 1, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.
- Soeikromo, Deasy, 2016, *Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi*, De Lega Lata, Vol. 1 No. 1, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/781/716>
- Sukmawati, Murlyta Nevi, *Jaminan Hak Tanggungan*, Airlangga Development Journal, Vol 3 No. 1, <https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18153>.
- Sularto, 2012 *Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 2, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16128/10674>.
- Sunge, Maisara, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Inovasi, Vol. 9 No.2, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/715>.
- Rahmi Rimanda, dan Yusri, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi pada Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah di Provinsi Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 3 No. 1, <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/download/14983/6505>.
- Zico Junius Fernando, Pujiyono, dan Nur Rochaeti, 2020, *Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum*

Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 1, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/805/pdf>.

SUMBER LAINNYA

<https://nasional.okezone.com/read/2021/06/10/337/2423199/rumah-milik-terpidana-korupsi-dana-pensiun-pertamina-dilelang-rp38-miliar>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 11.34 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-negara-vs-hak-kreditur--memilih-mana-yang-harus-didahulukan-hol16591?page=all>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 12.08 WIB.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/meski-pindah-tangan--objek-ht-tetap-bisa-dieksekusi-lt60364b4230e6e#_ftn2, diakses pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 9.08 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-eksekusi-hak-tanggungan-tak-cukup-lunasi-utang-cl6730#!>, diakses pada 16 Maret 2023, pukul 10:36 WIB.

Direktorat Hukum PPATK, 2021, *Kajian Hukum: Permasalahan Hukum seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan upaya Pengoptimalisasiannya*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta.

Putusan Nomor 705/PDT/2020/PT.DKI.

Putusan Nomor 2088K/PID.SUS/2018.